

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Sekretariat Jenderal (649001)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

Jalan Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur

Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung , Air Itam - Pangkalpinang

Telp. (0717) 439435-439439 Fax (0717)439435

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wabah COVID-19 memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Rumah sakit pemerintah dan swasta disiagakan bahkan dibangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID 19 ini. Kegiatan sterilisasi dilakukan secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum. Perilaku individu juga mendorong gerakan cuci tangan, physical distancing dan memakai masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan COVID-19 ini.

Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Selanjutnya, berbagai Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan pemerintah.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	12
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	25
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya	29
VI. Lampiran dan Daftar	30

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Air Itam Pangkalpinang
TELEPON 0717 439439 FAXIMILE 0717 439435**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.932.481 dari Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp 14.451.741.854 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.567.325.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 16.759.837.078 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.894.470; Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.736.685.733; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 8.256.875.

Nilai Ekuitas sebesar Rp 16.759.837.078.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.704.758 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.117.939.346 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp13.108.234.588) Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp9.100.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp13.083.433.645)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.219.958.118 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp13.083.433.645) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp16.759.837.078.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

6. Penjelasan Pos Belanja terdampak COVID-19

Penjelasan belanja secara umum mengikuti ilustrasi CaLK sebagaimana lampiran pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016. Untuk belanja khusus penanganan pandemi COVID-19 diuraikan setelah rincian per jenis belanja. Biasanya rincian belanja disajikan dengan menggunakan akun 3 atau 4 digit. Agar lebih informatif belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 dirinci per akun (6 digit).

Belanja barang pada CaLK dijelaskan perbandingannya antara realisasi belanja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sampai dengan 4 digit akun. Hal ini mengakibatkan akun belanja barang penanganan pandemi COVID-19 tidak terlihat pada CaLK tersebut, sehingga perlu ditambahkan penjelasan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19.

KODE	URAIAN	ANGGARAN	BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi	10.220.000	10.190.000	99.71%	30.000
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi	214.316.000	211.946.800	98.89%	2.369.200
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid	320.100.000	317.812.000	99.29%	2.288.000
	Jumlah Belanja	544.636.000	536.948.800	99.14%	4.687.200

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-20		% thn Angg	31-Des-19
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	33.932.481		9.576.314
JUMLAH PENDAPATAN		-	33.932.481		9.576.314
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6.953.447.000	6.873.790.504	98,85	6.523.398.221
Belanja Barang	B.4	5.176.378.000	5.140.516.000	99,31	3.925.513.350
Belanja Modal	B.5	2.437.500.000	2.437.435.350		
Belanja Bantuan Sosial	B.6		-		
JUMLAH BELANJA		14.567.325.000	14.451.741.854	99,21	10.448.911.571

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BANGKA BELITUNG NERACA 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-20
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-
Persediaan	C.9	14.894.470
Jumlah Aset Lancar		14.894.470
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan TP/TGR	C.10	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-
ASET TETAP		
Tanah	C.13	3.501.456.000
Peralatan dan Mesin	C.14	12.172.919.676
Gedung dan Bangunan	C.15	13.230.496.250
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	710.301.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	97.025.306
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(12.975.512.499)
Jumlah Aset Tetap		16.736.685.733
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	C.20	30.000.000
Aset Lain-Lain	C.21	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(549.286.794)
Jumlah Aset Lainnya		8.256.875
JUMLAH ASET		
		16.759.837.078
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Muka dari KPPN	C.23	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-
JUMLAH KEWAJIBAN		
		-
EKUITAS		
Ekuitas	C.26	16.759.837.078
JUMLAH EKUITAS		
		16.759.837.078
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
		16.759.837.078

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9.704.758	6.801.248
JUMLAH PENDAPATAN		9.704.758	6.801.248
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.873.790.504	6.523.398.221
Beban Persediaan	D.3	327.884.750	130.871.950
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.171.790.532	2.383.741.161
Beban Pemeliharaan	D.5	569.378.000	465.962.200
Beban Perjalanan	D.6	1.041.924.900	976.568.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.133.170.660	1.691.734.127
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		13.117.939.346	12.172.275.659
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13.108.234.588)	(12.165.474.411)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan pelepasan Aset non lancar	D.11	-	-
Beban pelepasan aset non lancar		-	-
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		15.854.423	5.392.166
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		24.800.943	4.112.166
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(13.083.433.645)	(12.161.362.245)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		13.083.433.645	(12.161.362.245)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PERIODE 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1	15.219.958.118	14.960.331.912
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13.083.433.645)	(12.161.362.245)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.6	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7	-	-
LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.8	-	-
Jumlah Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		14.623.312.605	10.758.733.507
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		1.539.878.960	259.626.206
EKUITAS AKHIR	E.9	16.759.837.078	15.219.958.118

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung berkomitmen dengan visi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung dilakukan beberapa misi sebagai berikut:

Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.

Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas.

Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas.

Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Mewujudkan layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja Sekretariat Jenderal di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah 1 satuan kerja.

Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	

1	3000	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa rumah dinas.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- c.** Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

d. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

e. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua l Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua l Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	6.291.177.000	6.953.447.000
Belanja Barang	4.615.205.000	5.176.378.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	2.380.000.000	2.380.000.000
Jumlah Belanja	13.286.382.000	14.509.825.000

B.1 PENDAPATAN

*Realisasi Pendapatan
Rp33.932.481*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.932.481. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan dari pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan pemindahtanganan BMN	-	21.793.541	
Pemanfaatan BMN		-	
Penerimaan kembali belanja TAYL		-	
Jumlah	-	21.793.541	-

B.2. BELANJA

*Realisasi Belanja
Negara
Rp14.451.741.854*

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.451.741.854 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp14.567.325.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.953.447.000	6.873.790.504	98,85
Belanja Barang	5.176.378.000	5.140.516.000	99,31
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Belanja Modal	2.437.500.000	2.437.435.350	
Total Belanja Kotor	0		
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	14.567.325.000	14.451.741.854	99,21

Realisasi Belanja 31 Desember 2020 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.873.790.504	6.523.398.221	94,90
Belanja Barang	5.140.516.000	3.925.513.350	76,36
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Belanja Modal	2.437.435.350		-
Jumlah	14.451.741.854	10.448.911.571	72,30

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp6.873.790.504

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.873.790.504 dan Rp6.523.398.221 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2020	REALISASI 31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.681.988.504	6.466.070.035	3,34
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	
Belanja Lembur	191.802.000	59.742.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6.873.790.504	6.525.812.035	5,33
Pengembalian Belanja Pegawai	-	2.413.814	
Jumlah Belanja	6.873.790.504	6.528.225.849	5,29

Belanja Barang
Rp5.140.516.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.140.516.000 dan Rp2.414.161.400 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami penurunan 3% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019.

Hal ini antara lain disebabkan adanya penurunan anggaran belanja pada tahun 2019.

Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.203.838.900	557.772.900	115,83
Belanja Barang Non Operasional	481.569.000	147.695.300	226,06
Belanja Jasa	1.465.846.000	796.486.000	84,04
Belanja Pemeliharaan	596.500.900	398.185.400	49,80
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.041.924.900	59.079.100	1.663,61
Belanja Barang persediaan	350.836.300	106.228.950	230,26
Jumlah Belanja Kotor	5.140.516.000	2.065.447.650	148,88
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	5.140.516.000	2.065.447.650	148,88

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp2.437.435.350

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.437.435.350 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 senilai Rp0 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.496.100	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.340.939.250	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Belanja Modal BLU	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	2.437.435.350	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja modal Tanah
Rp0*

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja modal
peralatan dan mesin
Rp96.496.100*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp96.496.100 dan Rp0.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
bangunan
Rp.2.340.939.250*

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.340.939.250 dan Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja modal
lainnya Rp0*

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rp90.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019

Keterangan	2020	2019
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak ada kas lainnya dan setara Kas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2020 dan 2019

Uraian	TH 2020	2019
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp14.894.470

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp14.894.470 dan Rp18.384.800. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	14.894.470	18.384.800
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Amunisi	-	-
Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat		
Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		
Persediaan untuk tujuan strategis		
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	14.894.470	18.384.800

C.14 Tanah

Tanah
Rp3.501.456.000

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.501.456.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		3.501.456.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer keluar	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	3.501.456.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	3.501.456.000

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020

Rp12.172.919.676

dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.172.919.676 dan Rp12.453.295.195. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		12.172.919.676
Mutasi tambah:	Rp	-
Pembelian		
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Penghentian aset dari kegunaan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	12.172.919.676
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	12.172.919.676

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan

Bangunan

Rp13.230.496.250

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp13.230.496.250 dan Rp10.889.557.000 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		13.230.496.250
Mutasi tambah:		-
transfer masuk		-
Pengembangan Nilai Aset		-
Koreksi nilai tim penertiban aset		-
Pembelian		-
Mutasi kurang		-
Trasfer keluar		-
Koreksi semu hasil penilaian kembali		-
Saldo per 31 Desember 2020		13.230.496.250
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020		-
Nilai Buku per 31 Desember 2020		13.230.496.250

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Rp710.301.000

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp710.301.000 dan Rp710.301.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	710.301.000
Mutasi tambah:	-
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	-
transfer keluar	-
Koreksi semu hasil penilaian kembali	-
Saldo per 31 Desember 2020	710.301.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	710.301.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp97.025.306*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp97.025.306.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	97.025.306
Mutasi tambah:	
transfer masuk	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2020	97.025.306
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	97.025.306

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp12.975.512.499)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp12.975.512.499) dan (Rp12.450.061.183) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 11.826.207.753	Rp 9.567.758.350	Rp 2.258.449.403
2	Gedung dan Bangunan	Rp 9.579.212.000	Rp 617.299.096	Rp 8.961.912.904
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 730.038.000	Rp 730.038.000	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 97.025.306	Rp -	Rp 97.025.306
Akumulasi Penyusutan		Rp 22.232.483.059	Rp 10.915.095.446	Rp 11.317.387.613

C.21 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp30.000.000*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp30.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	30.000.000
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	30.000.000
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	30.000.000

C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain Rp
527.286.794*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp 527.543.669 dan Rp0 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp549.286.794)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp549.286.794) dan (Rp30.000.000). Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	30.000.000	(30.000.000)	0
Aset Lain-lain	527.543.669	(549.286.794)	1.076.830.463
Jumlah	557.543.669	(579.286.794)	1.076.830.463

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kep. Bangka Belitung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Tagihan listrik	-
2	Tagihan Telepon	-
3	Tagihan pos	-
Total		Rp -

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp0.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

Tidak ada Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

C.28 Ekuitas

Ekuitas Rp16.759.837.078

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.759.837.078 dan Rp15.219.958.118. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp33.932.481

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp33.932.481 dan Rp9.576.314. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan berasal dari pemanfaatan BMN dan dengan rincian terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pemindahtanganan BMN	6.801.248	6.801.248	
Pemanfaatan BMN		-	
Penerimaan kembali belanja TAYL	-	-	
Jumlah	6.801.248	6.801.248	-

Beban Pegawai
Rp6.873.790.504

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.873.790.504 dan Rp6.523.398.221. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan tunjangan	6.681.988.504	6.463.656.221	0,97
Beban Lembur	191.802.000	59.742.000	0,31
Jumlah	6.873.790.504	6.523.398.221	1,28

Beban Persediaan
Rp350.836.300

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp350.836.300 dan Rp106.228.950. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	138.889.500	84.776.500	0,61
Beban Persediaan-Penanganan pandemi Covid 19	211.946.800	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	350.836.300	84.776.500	0,61

*Beban Barang dan
Jasa
Rp5.140.516.000*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 33.925.513.350. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp596.500.900*

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp596.500.900 dan Rp465.962.200. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	253.383.000	80.584.000	31,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	315.995.000	203.924.900	64,53
Beban persediaan bahan untuk Pemeliharaan	27.122.900	28.130.700	-
Jumlah	596.500.900	312.639.600	52,41

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.041.924.900*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.041.924.900 dan Rp976.568.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	779.155.400	665.793.900	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.100.000	17.680.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	208.669.500	80.814.800	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah	1.041.924.900	764.288.700	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp(549.286.794)

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember (549.286.794). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp24.800.943

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	-	-	-
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	24.800.943	4.112.166	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya			-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	24.800.943	4.112.166	-

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Defisit Pos Luar Biasa Rp0

Tidak ada defisit Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Belanja Modal BLU	0	0	-
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp15.219.958.118

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15.219.958.118 dan Rp14.960.331.912.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp13.083.433.645)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar (Rp13.083.433.645) dan (Rp12.161.362.245). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.8 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp16.759.837.078

Nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.759.837.078 dan Rp15.219.958.118.

Selisih revaluasi aset tetap Rp.0

E.9 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 untuk tanah, jalan dan gedung bangunan.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Terdapat GL BMN yang muncul dikarenakan pembelian akun covid 52 yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi yaitu sebesar Rp 10.190.000.